

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berhasilnya suatu pembangunan ekonomi di suatu negara ditandai dengan kenaikan pendapatan per kapita, dan kenaikan tersebut dilihat dari pendapatan yang bertambah dan kesejahteraan ekonomi masyarakat mengalami perbaikan (Lincoln, 2010). Faktor pendukung dari perekonomian suatu negara bukan hanya dari pembangunan ekonomi saja akan tetapi pembangunan ekonomi didukung juga oleh sumber daya manusia, modal, lingkungan, teknologi, dan sebagainya. Sumber daya manusia yang berkualitas juga produktif dan efisien di suatu negara atau wilayah dapat memegang peranan penting dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Tetapi akan menjadi sebuah masalah yang sulit dikendalikan apabila jumlah sumber daya manusia yang besar tetapi tidak produktif dan berkualitas artinya antara kuantitas dan kualitas dari sumber daya manusia tersebut tidak seimbang. Dengan demikian, dalam pembangunan ekonomi diperlukan tenaga kerja yang berkualitas untuk memajukan perekonomian di suatu negara (Elprida, 2020). Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah untuk memastikan ketersediaan lapangan kerja yang memadai untuk mengejar pertumbuhan angkatan kerja, yang dimana pertumbuhan angkatan kerja tersebut lebih cepat dari pada pertumbuhan kesempatan kerja (Sulfina, 2023). Pada akhirnya tujuan pembangunan ekonomi dapat mengurangi tingkat pengangguran.

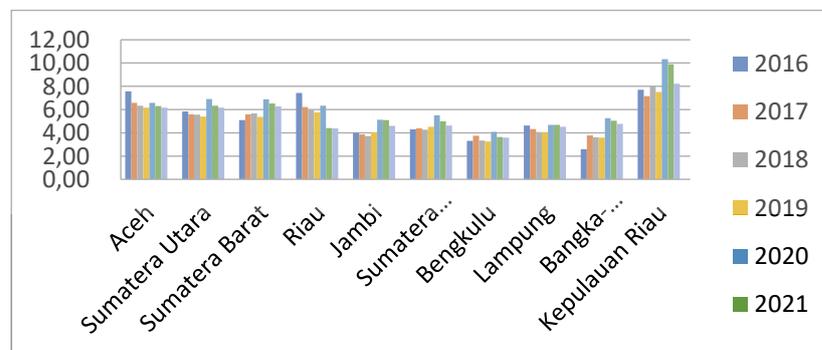
Aspek tenaga kerja tak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi, karena merupakan komponen dari sumber daya manusia. Dalam upaya mengembangkan sektor ekonomi dan meningkatkan produksi total melalui proses pembangunan ekonomi, hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia memiliki peran penting selama periode pembangunan ekonomi. Berdasarkan hal tersebutlah, pemerintah memilih kebijakan ketenagakerjaan sebagai elemen pokok dalam upaya memastikan keberhasilan pembangunan ekonomi melalui penyediaan lapangan pekerjaan. Jika jumlah angkatan kerja dapat diserap dengan baik sejalan dengan pertumbuhan penduduk, hal ini mencerminkan pembangunan ekonomi yang positif, di mana pertumbuhan penduduk diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang memadai.

Penyerapan tenaga kerja merujuk pada penduduk yang berhasil dipekerjakan dan tersebar di berbagai sektor, yang pada umumnya menghasilkan barang dan jasa dengan jumlah yang relatif besar. Pertumbuhan setiap sektor serta kapasitasnya dalam menyerap tenaga kerja berbeda-beda (Simanjuntak P. , 1985). Sudarsono (2007), menyatakan bahwa permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu, permintaan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi, antara lain naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan, tercermin melalui besarnya volume produksi, dan harga barang-barang modal yaitu mesin atau alat yang digunakan dalam proses produksi. (Widiastuti, 2014) juga menyatakan bahwa adanya penyerapan

Tenaga Kerja disebabkan adanya permintaan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja. Namun demikian, situasi tersebut bisa menimbulkan permasalahan apabila peningkatan penawaran tenaga kerja melampaui permintaan yang ada, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan masalah di sektor ketenagakerjaan yaitu pengangguran. Pengangguran merupakan masalah kompleks yang dapat menyebabkan keresahan sosial dan kemiskinan. Tingkat pengangguran mencerminkan tingkat kemakmuran ekonomi suatu negara. Oleh karena itu tugas pemerintah adalah mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai agar angkatan kerja dapat terserap dengan baik dan menghindari dampak buruk pengangguran tinggi (Ilham Mohammad, 2018).

Pulau Sumatera sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia yang terdiri dari 10 provinsi ini tentu saja memiliki berbagai persoalan seperti masalah tingkat pengangguran yang harus diselesaikan. Berikut ini adalah data pengangguran di Pulau Sumatera tahun 2016-2022.

Gambar 1 1
Data tingkat pengangguran di Pulau Sumatera tahun 2016-2022(persen)



Sumber : BPS Indonesia (diolah).

Dari gambar diatas dapat dilihat pada tahun 2016 sampai tahun 2022 tingkat pengangguran di pulau Sumatera mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2016, Kepulauan Riau menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi dengan persentase sebesar 7,69 persen. Pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi sebesar 7,16 persen. Angka tersebut mengalami kenaikan menjadi sebesar 8,04 persen pada tahun 2018 dan menurun kembali menjadi sebesar 7,5 persen pada tahun 2019. Sedangkan provinsi dengan tingkat pengangguran terendah terjadi di provinsi Bangka Belitung sebesar 2,60 persen pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017 tingkat pengangguran terendah terjadi di provinsi Bengkulu sebesar 3,74 persen dan angka tersebut terus menurun di tahun 2018 hingga tahun 2019 sebesar 3,26 persen.

Selanjutnya pada tahun 2020 tingkat pengangguran di setiap provinsi serentak mengalami kenaikan akibat dari adanya pandemi covid-19 yang dimana pada saat itu, terjadi pemutusan hubungan kerja(PHK) secara besar besaran di Indonesia, oleh sebab itu pandemi menyebabkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaannya sehingga tidak bekerja dan akhirnya menambah tingkat pengangguran. Namun pada tahun 2021 hingga tahun 2022 secara berkala, terjadi penurunan tingkat pengangguran di provinsi provinsi di Pulau Sumatera akibat dari program pemulihan ekonomi new normal pasca covid-19.

Tingkat pengangguran di masing-masing provinsi di Pulau Sumatera cenderung bervariasi. Kepulauan Riau memiliki tingkat pengangguran tertinggi di Sumatera, baik dilihat dari peningkatannya maupun persentase per tahunnya.

Bahkan Kepulauan Riau merupakan satu-satunya provinsi di Sumatera yang mengalami kenaikan tingkat pengangguran pada tahun 2018 pada saat semua provinsi lainnya mengalami penurunan. Tingginya tingkat pengangguran di provinsi Kepulauan Riau dipengaruhi oleh masih terbatasnya lapangan pekerjaan serta ketidakmampuan pencari kerja dalam bersaing terutama tenaga kerja terdidik karena kualitas SDM yang masih rendah. Sementara itu, Bengkulu memiliki tingkat pengangguran terendah meskipun angkanya berfluktuasi setiap tahun. Rendahnya tingkat pengangguran tersebut dapat dipengaruhi oleh peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mampu memperluas lapangan pekerjaan yang akan menopang pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kemiskinan di provinsi tersebut.

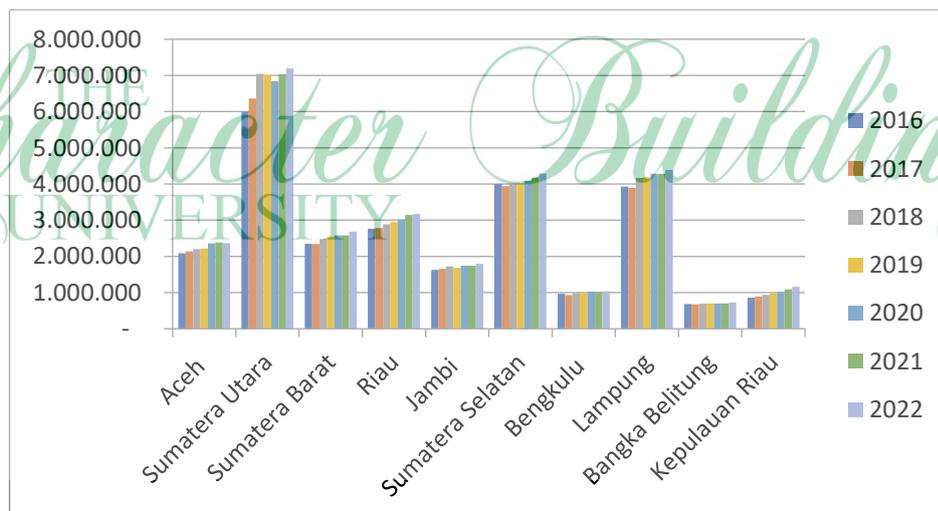
Dalam kurun waktu 7 tahun, dari tahun 2016 hingga 2022, tingkat pengangguran di Pulau Sumatera dinilai cukup tinggi. Rata-rata tingkat pengangguran di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera hampir mendekati tingkat pengangguran nasional (Indonesia). Dimana menurut data BPS, Tingkat pengangguran terbuka di tahun 2016 sebesar 5,61 persen, tahun 2017 sebesar 5,5 persen, tahun 2018 sebesar 5,3 persen, tahun 2019 sebesar 5,23 persen, tahun 2020 sebesar 7,07 persen, tahun 2021 sebesar 6,49 persen dan tahun 2022 sebesar 5,86 persen. Jika dilihat per provinsi, terdapat beberapa provinsi yang bahkan tingkat penganggurannya melebihi tingkat pengangguran nasional Indonesia. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kesenjangan pembangunan pembangunan ekonomi antar wilayah di Pulau Sumatera, ketergantungan pada sektor sektor tertentu seperti pertanian atau industri yang kurang kompetitif dan

mengalami stagnansi atau penurunan serta karena keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas seperti di provinsi Lampung.

Menurut (Alghofari, 2010) pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja. Karena tingkat pengangguran yang cukup tinggi tersebut, itu berarti jumlah tenaga kerja akan rendah.

Berikut ini data jumlah tenaga kerja (penduduk bekerja) di Pulau Sumatera tahun 2016-2022.

Gambar 1 2
Jumlah penduduk bekerja di 10 Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2016-2022 (jiwa).



Sumber: BPS (2023)

Di Pulau Sumatera, jumlah tenaga kerja di setiap provinsi cenderung terjadi peningkatan dari tahun 2016-2022. Jumlah tenaga kerja terbanyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara dan terendah terdapat di Provinsi Bangka Belitung. Tingginya jumlah tenaga kerja di Sumatera dapat dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam yang kaya dan beragam, seperti pertanian, perkebunan, pariwisata, dan industri. Selain itu keberadaan kota Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara juga salah satu pusat ekonomi dan bisnis di Pulau Sumatera, sehingga banyak orang yang mencari pekerjaan di kota ini. Provinsi Bangka Belitung menjadi provinsi dengan jumlah tenaga kerja terendah dipengaruhi oleh status provinsi Bangka Belitung yang merupakan provinsi yang relatif baru, dengan status provinsi yang diizinkan pada tahun 2001. Dalam perkembangannya sebagai provinsi yang baru, Bangka Belitung mungkin masih menghadapi keterbatasan lahan dan infrastruktur di pulau-pulau ini sehingga hal itu menjadi tantangan dalam mengembangkan sektor ketenagakerjaan dan menciptakan lapangan kerja di provinsi ini.

Jumlah tenaga kerja di setiap provinsi di pulau Sumatera cenderung terjadi peningkatan dari tahun 2016-2022, namun peningkatan tersebut terjadi secara lambat. Berdasarkan kondisi tersebut, hal itu dapat disimpulkan bahwa penyerapan tenaga kerja di pulau Sumatera belum optimal. Jika tenaga kerja tidak dapat terserap ke dalam lapangan pekerjaan maka mereka akan tergolong ke dalam orang yang menganggur yang akan meningkatkan jumlah pengangguran di wilayah tersebut (Adrian Sutawijaya,2012).

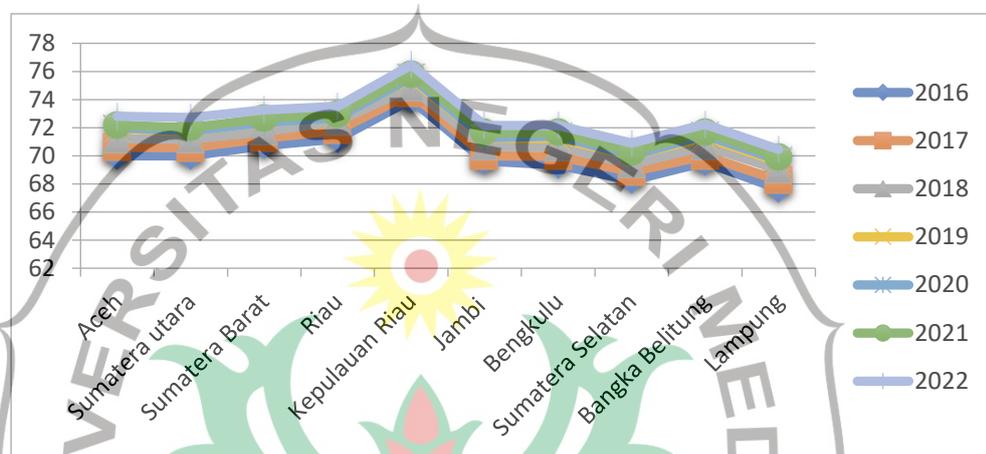
Penyerapan tenaga kerja di 10 provinsi di Pulau Sumatera tentu saja dipengaruhi oleh faktor faktor yang berbeda setiap wilayah. Menurut Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015) menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu faktor penting yang dapat mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan.

Dalam konteks pembangunan ekonomi suatu daerah, penyerapan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki daerah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah meliputi pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan SDM. Pemerintah daerah dan masyarakatnya bekerja sama untuk mengelola sumber daya yang ada dan menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Sumber daya manusia di setiap wilayah tersebut berbeda beda. Wilayah dengan kualitas SDM (pendidikan, keterampilan) yang lebih tinggi cenderung lebih mudah menyerap tenaga kerja karena produktivitasnya juga tinggi, begitupun sebaliknya. Berhasilnya peningkatan kualitas SDM dapat dilihat dari besaran angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kualitas hidup manusia yang semakin tinggi akan mendorong peningkatan produktivitas barang dan jasa yang akan dihasilkan, oleh sebab itu semakin tinggi IPM akan mempengaruhi tenaga kerja dalam mencari pekerjaan (Hafiz & Haryatiningsih, 2021). Grafik berikut ini akan memperlihatkan data perkembangan tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera tahun 2016-2022(persen):

Gambar 1 3

Tingkat IPM di Pulau Sumatera tahun 2016-2022



Sumber: BPS 10 Provinsi di Pulau Sumatera, (data telah diolah)

Berdasarkan gambar diatas dapat kita ketahui bahwa perkembangan Indeks Pembangunan Manusia(IPM) di Pulau Sumatera tahun 2016-2022 berfluktuatif. Provinsi Kepulauan Riau berada pada peringkat pertama provinsi dengan IPM tertinggi sebesar 76,46 persen di tahun 2022. Tingkat IPM terendah terdapat di Provinsi Lampung sebesar 70,45 persen. Tingkat IPM yang tinggi di Provinsi Kepulauan Riau dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti promosi kesehatan, pemerataan pendidikan, dan pemulihan ekonomi yang dilakukan secara bersama-sama. Selain itu, Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki potensi pariwisata yang menarik, terutama di Kepulauan Meranti, yang menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap daya tarik pariwisata di Kepulauan Riau. Dan rendahnya IPM di Provinsi Lampung disebabkan oleh keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah pedalaman terutama di kabupaten Pesisir Barat. Kurangnya fokus pemerintah pada sektor pendidikan dan

kesehatan di beberapa kabupaten karena lebih mengutamakan pelayanan kesehatan di Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi serta kurangnya kesadaran masyarakat akan program-program kesehatan dan sosial juga berkontribusi pada rendahnya IPM di provinsi tersebut.

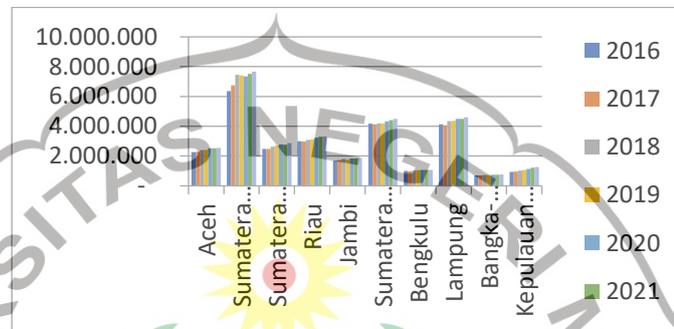
Menurut BPS tingkat IPM < 60 tergolong dalam kategori rendah. Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa tingkat Indeks Pembangunan Manusia tergolong tinggi. Daerah dengan IPM tinggi biasanya memiliki sumber daya manusia yang lebih terampil dan berkualitas. Tingginya kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan pembangunan kapasitas SDM lainnya akan mendorong penyerapan tenaga kerja yang lebih besar di berbagai sektor ekonomi. Oleh karena itu, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap Penyerapan tenaga kerja. Seperti dalam teori manusia modal (human capital theory) yang dikembangkan oleh (Becker, 1964) dan (Schultz, 1961) menyatakan IPM berpengaruh positif terhadap Penyerapan tenaga kerja bahwa balikan dari pendidikan dan kesehatan manusia dapat meningkatkan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi.

Namun teori Becker tersebut tidak sesuai dengan yang terjadi di Pulau Sumatera, dimana tingkat IPM di Pulau Sumatera meningkat dan ternyata tingkat pengangguran masih tinggi. Hal itu disebabkan oleh kualitas pendidikan yang kurang baik, sehingga tidak dapat meningkatkan kemampuan masyarakat,

kesehatan yang kurang baik, sehingga tidak dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan masyarakat tidak memiliki akses yang baik terhadap pendidikan dan kesehatan, sehingga tidak dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan. Lampung sebagai provinsi strategis di Sumatera, masih mengalami keterlambatan dalam pengembangan dan investasi publik, sehingga IPMnya tidak seharusnya lebih kecil dari provinsi lain di Pulau Sumatera. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan kualitas SDM, hal ini bertujuan agar semua lapisan masyarakat mendapatkan hak yang sama, karena pada implementasinya, masyarakat miskin tidak dapat mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan (Becker, 1993).

Selain dipengaruhi oleh kualitas SDM, penyerapan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh faktor jumlah angkatan kerja juga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Wilayah dengan jumlah angkatan kerja yang besar berarti memiliki pasokan tenaga kerja yang melimpah. Hal ini dapat memengaruhi kemampuan penyerapan tenaga kerjanya. (Douglas & Cobb, 1928) menyatakan bahwa terdapat korelasi positif antara peningkatan angkatan kerja dengan pertumbuhan output industri. Tanpa adanya penyerapan tenaga kerja oleh industri, maka potensi pertumbuhan output akibat peningkatan angkatan kerja tidak akan terwujud. Hal tersebut berarti peningkatan jumlah angkatan kerja mempengaruhi penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan.

Berdasarkan gambar dibawah dapat dilihat bahwa data perkembangan angkatan kerja di 10 Provinsi di Pulau Sumatera.

Gambar 1 4**Angkatan Kerja di 10 Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2016-2022 (jiwa)**

Sumber: Badan Pusat Statistik 10 Provinsi di Pulau Sumatera

Berdasarkan gambar diatas dapat kita lihat bahwa angkatan kerja di Pulau Sumatera dari tahun 2016-2022 cenderung mengalami peningkatan yang dimana total angkatan kerja meningkat dari angka 26,7 juta jiwa hingga mencapai angka 30,5 juta jiwa. Di tahun 2022 provinsi Sumatera Utara menyumbang angka tertinggi sebesar 7,7 juta jiwa diikuti oleh provinsi Lampung sebesar 4,6 juta jiwa dan terbesar ketiga adalah provinsi Sumatera Selatan sebesar 4.5 juta jiwa.

Jumlah angkatan kerja yang besar di Provinsi Sumatera Utara disebabkan oleh tingginya tingkat kelahiran penduduk dan arus migrasi penduduk ke wilayah tersebut. Sumatera Utara merupakan salah satu dari empat pusat pertumbuhan ekonomi utama di Indonesia. Selain itu hasil perkebunan dan peluang perdagangan yang ada juga menjadi daya tarik penduduk untuk tinggal di provinsi ini. Menurut teori yang dikemukakan Malthus, semakin tingginya jumlah penduduk akan berdampak pada peningkatan penawaran kerja.

Jika dihitung rata rata jumlah angkatan kerja di Pulau Sumatera dari tahun 2016-2022, jumlahnya sebesar 29.692.913 jiwa. Dengan jumlah sebesar itu, artinya Pulau Sumatera menyumbang sekitar 20,68% dari total angkatan kerja di Indonesia. Angka ini didapatkan dengan membandingkan jumlah angkatan kerja di pulau Sumatera dengan total angkatan kerja di seluruh Indonesia, yang mencapai sekitar 143,72 juta jiwa pada periode yang sama.

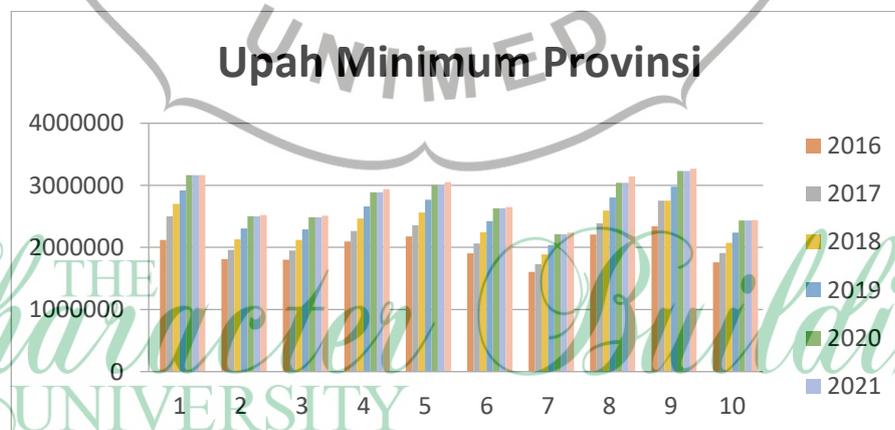
Besarnya jumlah angkatan kerja tersebut tentu diharapkan akan mempengaruhi pertumbuhan output industri atau perusahaan. Akan tetapi kenyataannya, jumlah angkatan kerja yang tinggi tersebut tidak sebanding dengan jumlah penduduk bekerja di Pulau Sumatera pada periode waktu yang sama. Dimana jumlah rata rata penduduk yang bekerja hanya sekitar 27.150.892 jiwa. Itu artinya penyerapan tenaga kerja masih kurang efektif di Pulau Sumatera pada periode waktu 2016-2022. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan penyediaan lapangan pekerjaan memperhatikan penyediaan lapangan pekerjaan agar jumlah angkatan kerja yang semakin besar dapat terserap.

Selain IPM dan angkatan kerja, penyerapan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh Upah Minimum Provinsi (Rakhmawati,2018). Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap dipengaruhi oleh besar kecilnya pertumbuhan upah minimum provinsi yang ditentukan (Indradewa,2015). Semakin tinggi UMP semakin sedikit penyerapan tenaga kerjanya.Seperti yang dikemukakan oleh (Kauffman dan Hotchkiss, 1999) semakin tinggi besaran upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan

jumlah orang yang bekerja pada negara tersebut. Hal ini karena ketika besaran upah meningkat, perusahaan cenderung akan mencari cara untuk mengurangi biaya produksi, termasuk dengan mengurangi jumlah tenaga kerja. Hal ini terjadi karena pengusaha ingin mempertahankan keuntungan mereka dan mengimbangi kenaikan biaya yang disebabkan oleh kenaikan upah. Dengan demikian terdapat pengaruh yang negatif antara UMP dengan penyerapan tenaga kerja. Dimana ketika Upah minimum provinsi naik, maka jumlah tenaga kerja yang terserap akan berkurang. Berikut disajikan gambar yang menunjukkan rata-rata UMP di Pulau Sumatera tahun 2016-2022.

Gambar 1 5

Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2016-2022



Sumber: BPS 10 Provinsi di Pulau Sumatera, (diolah)

Berdasarkan data diatas dapat kita ketahui bahwa UMP di 10 Provinsi di Pulau Sumatera selalu mengalami kenaikan. Provinsi dengan upah minimum tertinggi di tahun 2022 adalah provinsi Bangka Belitung yaitu mencapai angka sebesar Rp 3.264.881 dan upah minimum terendah adalah

terdapat pada Provinsi Bengkulu yaitu sebesar Rp 2.238.094. Tingginya tingkat Upah Minimum Provinsi di Bangka Belitung dapat dipengaruhi oleh beragamnya sektor ekonomi yang dimiliki provinsi tersebut, termasuk sektor pertambangan, ekspor-impor, industri dan pariwisata, yang dapat menjadi faktor penentu dalam penetapan UMP yang tinggi di provinsi tersebut. Sedangkan Provinsi Bengkulu memiliki UMP yang rendah dapat dikarenakan tingkat produktivitas tenaga kerja di Bengkulu yang masih rendah yang dimana hal tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan UMP yang lebih rendah agar tidak memberatkan pengusaha.

UMP di Pulau Sumatera mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan tersebut tentu akan menjadi beban biaya bagi perusahaan sehingga mereka akan mengurangi jumlah tenaganya. Namun data menunjukkan terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja di Pulau Sumatera. Hal tersebut akan menyebabkan penurunan produktivitas tenaga kerja dimana meskipun jumlah tenaga kerja meningkat, produktivitas individu mungkin mengalami penurunan karena berbagai faktor seperti kurangnya keterampilan atau pelatihan yang sesuai. Peningkatan jumlah tenaga kerja juga memungkinkan mungkin terjadi dalam sektor-sektor yang kurang produktif atau tidak seimbang dengan permintaan pasar, sehingga mengakibatkan penumpukan tenaga kerja pada pekerjaan yang tidak optimal. Peningkatan jumlah tenaga kerja kemungkinan terjadi dalam sektor informal, yang seringkali tidak tercatat secara resmi dan mungkin tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja.

Berdasarkan fenomena masalah yang telah peneliti kemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengamati masalah penyerapan tenaga kerja dan menganalisis lebih dalam kondisi penyerapan tenaga kerja serta apa saja faktor faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan peneliti tersebut,terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Tingkat pengangguran di Pulau Sumatera tahun 2016-2022 tergolong tinggi.
2. Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera tahun 2016-2022 tergolong tinggi dan meningkat setiap tahun. Keadaan tersebut seharusnya mampu mendorong penyerapan tenaga kerja oleh suatu lapangan pekerjaan tetapi kenyataannya tidak.
3. Terjadi ketidakseimbangan antara peningkatan angkatan kerja dengan permintaan tenaga kerja di Pulau Sumatera tahun 2016-2022.
4. UMP di Pulau Sumatera tahun 2016-2022 yang sudah termasuk tinggi dan terus mengalami kenaikan akan menyebabkan kemungkinan tenaga kerja yang bekerja pada pekerjaan yang tidak optimal

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak terlalu melebar,maka peneliti membuat pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Objek dalam penelitian adalah 10 Provinsi di Pulau Sumatera

2. Penelitian ini mengangkat variabel dependen yaitu Penyerapan Tenaga Kerja tahun 2016-2022.
3. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum provinsi dan Jumlah Angkatan Kerja pada tahun 2016 -2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah, maka Penelitian ini merumuskan masalah:

1. Apakah terdapat pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera tahun 2016-2022 ?
2. Apakah terdapat pengaruh Jumlah angkatan kerja terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera tahun 2016-2022 ?
3. Apakah terdapat pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera tahun 2016-2022 ?
4. Apakah terdapat pengaruh secara simultan Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Provinsi dan Jumlah angkatan kerja terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera tahun 2016-2022 ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera tahun 2016-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap penyerapan

tenaga kerja di Pulau Sumatera tahun 2016-2022 .

3. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah angkatan kerja terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera tahun 2016-2022 .
4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Provinsi dan Jumlah angkatan kerja terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera tahun 2016-2022.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain: :

1. Manfaat Akademis

Peneliti mengharapkan agar kiranya hasil penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi diri sendiri dalam mengembangkan, menambah, memperluas ilmu pengetahuan terkait bidang pengelolaan sumber daya manusia khususnya mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera tahun 2016-2022.

2. Manfaat Praktis

Peneliti juga mengharapkan agar sekiranya penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah untuk dijadikan sarana berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan dalam mengatasi masalah penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera. Serta kepada peneliti-peneliti berikutnya bisa dijadikan acuan di dalam penelitian mereka